

Pengungkapan Kualitatif Umum Risiko Kredit
PT Bank Pembangunan Daerah Bali
Periode Desember 2021

Parameter Pendekatan	Pengungkapan Kualitatif Umum
<p>1) informasi mengenai penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit, termasuk organisasi manajemen risiko kredit, strategi manajemen risiko kredit untuk aktivitas yang memiliki eksposur risiko kredit yang signifikan, kebijakan pengelolaan risiko konsentrasi kredit, serta mekanisme pengukuran dan pengendalian risiko kredit;</p>	<p>1) Bank telah memiliki Komite Kebijakan Perkreditan yang diketuai oleh Direktur Utama, selaku Sekretaris yaitu Kepala Divisi Kredit dan bertanggung jawab seluruh Direksi, Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kepala Divisi Kepatuhan, Kepala SKAI & Anti <i>Fraud</i> yang didukung oleh <i>staff supporting group</i> memiliki fungsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberi masukan dan saran dalam rangka penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan. - Mengawasi dan memastikan kebijakan perkreditan Bank untuk dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapannya. - Melakukan kajian berkala terhadap kebijakan perkreditan Bank dan memberikan saran kepada Direktur Utama apabila diperlukan perubahan atau perbaikan. - Memantau dan Mengevaluasi : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Perkembangan dan kualitas seluruh portofolio perkreditan; ➢ Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit;

	<p>➤ Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu;</p> <p>➤ Kebenaran pelaksanaan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);</p> <p>➤ Ketepatan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit;</p> <p>➤ Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p> <p>➤ Memantau kewajiban Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN);</p> <p>Bank telah melakukan kajian risiko kredit dari sisi kualitas kredit, yaitu NPL dan KAP dari masing-masing sektor ekonomi, portofolio, dan sumber dana, yang dapat digunakan sebagai sumber informasi potensi risiko kredit secara <i>Bankwide</i> setiap bulan, untuk melakukan identifikasi terhadap konsentrasi risiko kredit. Bank juga telah memiliki ketentuan mengenai <i>Risk Acceptance Criteria</i> (RAC) yang digunakan sebagai <i>prescreening</i> dalam rangka penyaluran kredit.</p> <p>Bank melakukan tindak lanjut atas perbaikan rasio NPL dengan melakukan Ekspansi Kredit secara hati-hati, Penagihan, Penyelamatan Kredit/Restrukturisasi, Lelang Hak Tanggungan dan Berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI). Bank juga telah melakukan strategi perbaikan kualitas debitur <i>retail</i> (<i>non</i> korporasi) diantaranya dengan penanganan</p>
--	--

<p>2) Definisi tagihan yang telah jatuh tempo dan tagihan yang mengalami penurunan nilai (<i>impairment</i>); dan</p>	<p>kredit bermasalah melalui pelaksanaan restrukturisasi kredit terhadap debitur-debitur yang masih memiliki prospek usaha, kooperatif dan pengikatannya telah sempurna, dimana dimungkinkan untuk dilakukan restrukturisasi kepada debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunganya tanpa harus terlebih dahulu masuk kategori <i>non performing loan</i>, meningkatkan pemantauan terhadap kredit-kredit yang memiliki potensi risiko kredit bermasalah melalui pengetatan pemantauan kredit secara berkala, melakukan pembinaan kepada debitur-debitur bermasalah yang masih kooperatif dan ekspansi kredit yang memfokuskan penyaluran kredit dengan potensi risiko rendah.</p> <p>2) Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo adalah seluruh tagihan baik Tagihan Kepada Pemerintah, Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik, Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional, Tagihan Kepada Bank, Kredit Beragun Rumah Tinggal, Kredit Beragun Properti Komersial, Kredit Pegawai atau Pensiunan, Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel, dan Tagihan Kepada Korporasi yang telah jatuh tempo lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, baik atas pembayaran pokok dan/atau pembayaran bunga. Tagihan yang telah mengalami penurunan nilai (<i>impairment</i>) merupakan tagihan yang mengalami penurunan nilai kredit ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan yang telah terjadi.</p>
---	---

<p>3) penjelasan mengenai pendekatan yang digunakan untuk pembentukan CKPN individual dan kolektif, serta metode statistik yang digunakan dalam perhitungan CKPN.</p>	<p>3) Perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai terdiri dari metode Kredit ekspektasian 12 bulan dan kredit ekspektasian sepanjang umurnya. Pembentukan penyisihan kerugian kredit ekspektasian maksimal sebesar nilai tercatat kredit masing-masing rekening pinjaman (maksimal 100%). Teknik dalam mengevaluasi kerugian kredit ekspektasian menggunakan metode <i>migration analysis</i>, dengan menggunakan pendekatan statistik dari data historis kredit berdasarkan segmentasi <i>bank wide, rating (stage)</i>, skim kredit atau produk. Dalam menentukan besarnya kerugian kredit ekspektasian, maka pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai mencakup : <i>Probability of Default (PD), Exposure at default (EAD), Lost Given default (LGD), Discount Factor (DF), dan Forward Looking Adjustment (FLA)</i>. Sehingga perhitungan kerugian kredit ekspektasian adalah</p> $ECL = PD \times EAD \times LGD \times DF \times FLA$
<p>1) Informasi mengenai kebijakan penggunaan peringkat dalam perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit;</p> <p>2) Kategori portofolio yang menggunakan peringkat; dan</p>	<p>1) Penggunaan peringkat dalam perhitungan ATMR untuk risiko kredit mengacu pada SEOJK Nomor 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar sebagaimana diubah dengan SEOJK Nomor 11/SEOJK.03/2018 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/SEOJK.03/2016 Tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar.</p> <p>2) Kategori portofolio yang menggunakan peringkat adalah Portofolio Tagihan Kepada Pemerintah khususnya Tagihan kepada Pemerintah Indonesia berupa</p>

	<p>Penempatan pada Bank Indonesia dan Surat Berharga. Selain itu portofolio yang juga menggunakan peringkat yaitu Portofolio Tagihan kepada Bank, baik pada Tagihan Jangka Pendek berupa penempatan pada Bank lain, serta Tagihan Jangka Panjang berupa penempatan pada Bank lain dan surat berharga.</p> <p>3) Lembaga pemeringkat yang digunakan.</p>
<p>1) Informasi mengenai kebijakan Bank untuk jenis agunan utama yang diterima</p> <p>2) Informasi kebijakan, prosedur dan proses untuk menilai dan mengelola agunan</p>	<p>Pemberian kredit yang dilaksanakan oleh Bank diatur dalam kebijakan dan prosedur perkreditan dimana untuk setiap jenis atau skema kredit telah ditentukan agunan minimal yang harus dipenuhi.</p> <p>Bank menetapkan jenis dan nilai agunan yang dijaminan sesuai skema kredit dan perkiraan tingkat risiko kredit dari <i>counterparty</i> sebagai <i>second way out</i> yang ditetapkan. Jenis dari agunan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Physical Collateral</i>, berupa tanah dan bangunan. b. <i>Financial Collateral</i>, berupa simpanan (tabungan, giro dan deposito), surat berharga, dan lain-lain. c. Lainnya berupa garansi, lembaga penjamin, dan lain-lain. <p>Untuk segmen kredit komersial, sesuai dengan ketentuan perkreditan wajib dijamin oleh agunan yang memadai. Agunan dapat berupa <i>physical collateral</i>, <i>financial collateral</i> atau lainnya berupa tagihan usaha atau garansi. Untuk seluruh agunan khususnya <i>physical collateral</i> akan dilakukan retaksasi dimana nilai likuidasi atas agunan tersebut yang akan dipergunakan dalam menentukan kecukupan nilai agunan (<i>coverage ratio</i>).</p>

<p>3) Pihak-pihak utama pemberi jaminan atau garansi dan kelayakan kredit dari pihak-pihak tersebut</p> <p>4) Informasi tingkat konsentrasi yang ditimbulkan dari penggunaan teknik mitigasi resiko kredit</p>	<p>Penilaian agunan dilakukan oleh penilai interen untuk plafon kredit sampai dengan Rp. 5 miliar rupiah sedangkan untuk diatas plafon tersebut wajib menggunakan independen, namun demikian terhadap penilaian agunan untuk kepentingan Lelang atau AYDA penilaian wajib menggunakan penilaian independen (KJPP) hal tersebut tertuang dalam SOP Analisa Penilaian Agunan dan jaminan kredit Buku III Keputusan Direksi No. 0230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 dan telah dilakukan beberapa perubahan sebagaimana perubahan Buku V Penanganan Kredit bermasalah sesuai Keputusan Direksi nomor :0575/KEP/DIR/KRD/2017 tanggal 30 Oktober 2017.</p> <p>Selain aspek agunan untuk meminimalkan risiko kredit, pemberian kredit oleh Bank selalu dilakukan berdasarkan evaluasi dan analisa kelayakan sehingga kemampuan pengembalian kredit (<i>first way out</i>) dapat dipastikan.</p> <p>Adanya keharusan bagi debitur untuk memenuhi agunan yang dipersyaratkan, evaluasi atas kelayakan kredit, pengikatan kredit secara legal dan prosedur <i>pre screening</i> akan menurunkan <i>credit risk eksposur</i> Bank ke tingkat yang layak dan dapat diterima.</p> <p>Bank melakukan pengelolaan resiko konsentrasi kredit dengan melakukan pemantauan antara lain untuk eksposur sektor ekonomi kredit, portofolio kredit, kode produk kredit, jenis penggunaan kredit serta eksposur perorangan dan non perorangan. Sesuai dengan karakteristiknya, kredit yang ada di Bank saat ini terbagi dalam kredit produktif dan kredit konsumtif. Untuk mengelola risikonya, Bank mengukur risiko</p>
--	--

	<p>Kredit dari portofolio yang ada baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Hal ini untuk memastikan kemungkinan kerugian dari tidak dibayarinya pinjaman yang diberikan menjadi seminimal mungkin, baik untuk debitur individu maupun secara keseluruhan.</p>
--	---